

Analisis Faktor Penentu Kebijakan Luar Negeri Rusia dalam Konflik Nagorno-Karabakh tahun 2012 – 2016

Charel Pasifichus Boy¹⁾, Idin Fasisaka²⁾, Putu Titah Kawitri Resen³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: charelpasifichus24@gmail.com¹, idinfasisaka@yahoo.co.id², kawitriresen@gmail.com³

ABSTRACT

Russia's involvement in the Nagorno-Karabakh conflict has its own implications especially with its capacity as a mediator of conflict. Mediation efforts continue to be carried out by Russia both independently and collectively within the OSCE Minsk Group framework. On the contrary, Russia's role as a mediator failed to bring a peace agreement and the Nagorno-Karabakh conflict escalated. This situation raises the assumption that Russia acts as a mediator solely not to achieve conflict resolution but to fulfill its interests in the region. Based on the above idea, the emergence of this research is to analyze Russia's foreign policy determinants as mediator in the Nagorno-Karabakh conflict, especially in the period 2012 - 2016. This research is a qualitative-descriptive study using the concept of mediators, national interest and determinants of foreign policy as instruments of analysis.

Keywords : *Russia, Nagorno-Karabakh Conflict, National Interest, Mediator*

1. PENDAHULUAN

Keterlibatan Rusia dalam konflik Nagorno-Karabakh telah berlangsung sejak lama, termasuk upayanya dalam menjalankan tugas sebagai mediator konflik. Sejak tahun 1994, Rusia telah menjadi mediator konflik baik secara independen maupun kolektif bersama dengan Amerika Serikat dan Perancis dalam *OSCE Minsk Group*, sebuah badan khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan konflik Nagorno-Karabakh. Di tahun 2012, saat pemerintahan di Russia kembali dipimpin oleh Vladimir Putin, Rusia tidak menunjukkan adanya kemunduran upaya dalam melakukan proses mediasi untuk mencapai resolusi konflik. Bahkan upaya yang ada semakin menunjukkan indikasi bahwa Rusia hendak memonopoli upaya mediasi.

Melanjutkan upaya mediasi yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Rusia di tahun 2008, Rusia kembali mengadakan pertemuan

pada tahun 2012 di Sochi (Mediamax, 2012). Upaya ini merupakan kelanjutan upaya mediasi trilateral yang dilakukan oleh Rusia dengan mempertemukan presiden kedua negara yang berkonflik. Di bawah payung *OSCE Minsk Group*, Russia mengambil inisiatif untuk memulai pertemuan trilateral. Inilah yang kemudian menjadi indikasi bahwa Rusia terkesan memonopoli upaya mediasi. Padahal, di dalam tubuh *OSCE Minsk Group* sendiri terdapat Amerika Serikat dan Perancis yang juga memiliki kedudukan yang sama dengan Rusia sebagai koordinator grup.

Di tahun-tahun berikutnya, pertemuan-pertemuan trilateral lanjutan kemudian terus diadakan oleh Rusia. Tahun 2014, Rusia kembali mengundang Armenia dan Azerbaijan untuk bernegosiasi setelah pecahnya konflik di garis pertahanan Nagorno-Karabakh yang menewaskan 20 orang (RFERL, 2014a). Agenda utama pertemuan ini adalah membahas mengenai resolusi konflik sebab

eskalasi yang menimbulkan korban jiwa ini merupakan hal yang sama sekali tidak diharapkan baik secara regional dan internasional. Pada bulan November 2015, Rusia kembali berinisiatif mengundang kedua negara untuk bertemu (International Crisis Group, 2016, p.7). Melalui menteri luar negerinya Sergei Lavrov, Rusia berhasil mempertemukan menteri luar negeri Armenia dan Azerbaijan dan terlibat dalam diplomasi yang intens. Dalam pertemuan tersebut, Lavrov menegaskan keseriusan Rusia dalam menyelesaikan konflik Nagorno-Karabakh dan ini merupakan prioritas kebijakan luar negeri Rusia serta diawasi langsung oleh Presiden Putin.

Kesungguhan Rusia mengadakan berbagai pertemuan trilateral kemudian mengundang banyak pertanyaan dari berbagai kalangan pemerhati konflik ini. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Rusia seperti cenderung melakukan monopoli dalam proses mediasi semakin menguat. Padahal, menurut Anna Sargasyan, seorang peneliti dari CSS (Center of Security Studies) Rusia tergolong pihak yang enggan membantu untuk menemukan resolusi konflik (Sargasyan, 2013, p. 3). Di sisi lain, walaupun disebut oleh Sargasyan sebagai pihak yang menunjukkan keengganan dalam menyelesaikan konflik, kenyataannya Rusia memang tercatat sebagai pihak yang paling aktif mengadakan mediasi dan pertemuan-pertemuan dengan pihak yang berkonflik. Menurut penelitian Ensi Adistyia, Rusia merupakan mediator aktif dengan mengadakan 8 kali pertemuan trilateral dalam rentang waktu 2008 – 2012. Bila ditambah dengan yang dilakukan di tahun 2014 dan

2015 maka sudah 10 kali Rusia terlibat dalam upaya resolusi konflik (Adistia, n.d.). Keterlibatan ini jauh lebih banyak dari negara co-chair lain yang ada dalam OSCE Minsk grup. Padahal Rusia sendiri tergabung dalam badan ini bersama dengan Amerika Serikat dan Perancis. Indikasi upaya Rusia memonopoli proses mediasi pun menjadi tidak sebatas wacana saja. Inilah yang kemudian menjadi acuan analisis penulis untuk melihat secara lebih mendalam mengenai faktor-faktor penentu keterlibatan Rusia termasuk juga kepentingannya dalam konflik Nagorno-Karabakh.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa literatur sebagai kajian pustaka untuk mendukung kegiatan berpikir dan proses penulisan skripsi ini. Literatur pertama adalah sebuah tulisan berjudul *Russian Meddling in its Near Abroad: The Use of Frozen Conflicts as a Foreign Policy Tool* dari Andrew Sprague tahun 2015. Sprague menjelaskan bahwa menghadapi gelombang pembentukan negara-negara baru pasca runtuhnya Uni Soviet, Rusia memiliki pandangan dan tindakan tersendiri. Sebagai negara bekas Uni Soviet yang pasca keruntuhan tetap berdiri sebagai salah satu kekuatan politik dan ekonomi internasional yang cukup kuat, Rusia menempatkan dirinya sebagai “*regional power broker*”. Konsekuensinya, Rusia menjadi begitu aktif dalam bidang politik, militer dan ekonomi di kawasan termasuk dalam hal penanganan konflik. Keterlibatan ini merupakan respon dari tindakan luar negeri Rusia yang oleh

Sprague (mengutip teori *balance of threat* milik Stephan Walt) dijabarkan sebagai aksi untuk menghadapi ancaman karena keseimbangan kekuatan (*balance of power*) memang tidak berubah tetapi keseimbangan ancaman (*balance of threat*) akan terus berubah (Sprague, 2015, p.2).

Tulisan dari Andrew Sprague memberikan gambaran mengenai pandangan Rusia terhadap konflik di wilayah bekas Uni Soviet. Hal ini kemudian bisa membantu penulis untuk menguraikan tentang latar belakang dan motif tindakan Rusia dalam menggunakan konflik sebagai sarana kebijakan di kawasan bekas Uni Soviet termasuk kawasan Kaukasus Selatan.

Literatur berikutnya adalah tulisan dari Aleksandra Jarosiewicz dan Krzysztof Strachota berjudul *Nagorno-Karabakh: Conflict Unfreezing* yang dimuat di OSW Commentary tahun 2011. Jarosiewicz dan Strachota menulis bahwa faktor penyebab meningkatnya gelombang ancaman terhadap status Nagorno-Karabakh adalah interpretasi Armenia dan Azerbaijan terhadap Nagorno-Karabakh yang sama-sama menganggap wilayah tersebut penting (Jarosiewicz and Strachota, 2011, p.2). Keadaan ini bisa membawa suatu perubahan struktur politik secara besar-besaran. Peta perkembangan konflik ini bisa mengancam keberadaan Rusia yang secara kapabilitas memiliki aset politik dan militer yang paling mapan di kawasan Kaukasus Selatan. Armenia merupakan basis militer Rusia dengan penempatan tentara Rusia dan perpanjangan penyewaan military bases (markas militer) sampai tahun 2044. Terhadap Armenia, Rusia telah lama melakukan aliansi dan perjanjian ini semakin

menguatkan kontrol Rusia terhadap Armenia. Sedangkan Azerbaijan telah mengalami peningkatan ekonomi terutama dengan penjualan minyaknya dan mampu muncul sebagai kekuatan politik baru di kawasan Kaukasus Selatan. Konflik Nagorno-Karabakh adalah sebuah alat yang berguna untuk memenuhi harapan Rusia mendapatkan kontrol terhadap Azerbaijan sekaligus terhadap Kaukasus Selatan (Jarosiewicz and Strachota, 2011, p.5).

Tulisan dari Jarosiewicz dan Strachota dapat membantu penulis dalam mengenali secara lebih dalam tentang konflik Nagorno-Karabakh. Bila dikaitkan dengan apa yang akan penulis bahas dalam penelitian ini, literatur dari Jarosiewicz dan Strachota memberikan pemahaman geopolitis dan arti penting tentang konflik dan wilayah Nagorno-Karabakh khususnya di kawasan Kaukasus Selatan.

Tulisan terakhir yang penulis gunakan sebagai kajian pustaka adalah Jurnal Skripsi dari Enzi Aditya yang berjudul *Keterlibatan Rusia Dalam Upaya Resolusi Konflik Nagorno-Karabakh Antara Armenia dan Azerbaijan 2008-2012*. Adistia menggunakan konsep resolusi konflik dalam mengembangkan pemikirannya tentang keterlibatan Rusia dalam konflik Nagorno-Karabakh. Konsep resolusi konflik digunakan untuk melihat upaya-upaya positif yang dilakukan Rusia untuk menghadirkan perdamaian pada konflik Nagorno-Karabakh. Sedangkan konsep mediator dipakai untuk melihat derajat intensitas keterlibatan Rusia dalam proses resolusi konflik Nagorno-Karabakh. Hasil penelitian Ensy Adistia menunjukkan bahwa Rusia memang terlibat

secara positif dalam upaya resolusi konflik Nagorno-Karabakh. Hal ini dibuktikan dengan keaktifannya dalam memfasilitasi dan membangun komunikasi yang positif dalam kapasitasnya sebagai mediator.

Tulisan dari Enzy Adistia ini berkontribusi terhadap upaya penulis membangun kerangka berpikir tentang posisi Rusia dalam konflik Nagorno-Karabakh. Peran dan keterlibatan yang dimainkan Rusia ditunjukkan oleh Adistia dengan mengukur kapasitasnya sebagai mediator. Yang membedakan tulisan ini dengan tulisan penulis adalah tulisan ini hanya berusaha membuktikan apakah Rusia benar-benar menjalankan perannya sebagai mediator secara aktif dan positif. Sedangkan tulisan yang penulis kerjakan ini tidak berusaha membuktikan derajat keterlibatan Rusia secara aktif atau tidak tetapi akan membahas faktor-faktor penentu kebijakan luar negeri sebagai mediator konflik Nagorno-Karabakh.

2.2 Kerangka Konseptual

2.2.1 Mediator

Menurut Gilbert Khadiagala mediator merupakan pihak ketiga yang mendapatkan privilese untuk menerima sebagian kedaulatan yang diberikan oleh pihak-pihak yang berselisih sebagai bentuk dari elemen kontrol proses dalam menentukan keberlangsungan konflik (entah itu akan berakhir dengan resolusi atau sebaliknya) (Khadiagala, 2007, p.6). Namun, dalam implementasinya, keterlibatan sebagai mediator seringkali diikuti oleh berbagai intensi dan niat tertentu dari aktornya. Ketika mediator memiliki pengaruh internasional atau

kapabilitas yang lebih besar daripada pihak yang berkonflik, maka mediator ini ditakutkan akan lebih mudah memanipulasi pihak yang berkonflik (Khadiagala, 2007, p.5). Bila terjadi proses manipulasi maka yang berikutnya mengikuti adalah proses mediasi diarahkan untuk keuntungan mediator bukan pihak yang berkonflik.

Sejalan dengan pemikiran Khadiagala, Pinar Akpinar dalam tulisannya yang dimuat dalam *Journal of Balkan and Near Eastern Studies* tahun 2015 mengatakan bahwa mediasi adalah bentuk dari sebuah kebijakan luar negeri. Apalagi bila aktor yang menjalankan proses mediasi tersebut adalah sebuah negara. Dengan berpatokan pada pemikiran Ramsbotham, Touval, Wall dan Kamrava, Akpinar (2015, p.2) menjelaskan bahwa upaya mediasi akan dilandaskan pada kepentingan domestik dan strategi serta tujuan dari kebijakan luar negeri. Oleh karena itu, hasil akhir dari sebuah proses mediasi tidak melulu merupakan keberhasilan mengakhiri suatu konflik tetapi bisa berupa penguatan peran regional, implementasi legitimasi ataupun kepentingan pembentukan imej ataupun prestise yang lebih baik di dunia internasional.

2.2.2 Determinan Kebijakan Luar Negeri

Determinan kebijakan luar negeri adalah faktor-faktor penentu yang mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri suatu negara (Jain, 2018, p.165). Faktor-faktor ini menurut Jain dapat dikelompokkan ke dalam 2 kelompok besar yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari pengaruh sejarah, geografi

wilayah, sumber daya alam, perkembangan ekonomi, pengembangan industri, kapabilitas militer dan populasi. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari organisasi internasional, reaksi negara lain, aliansi, opini publik dunia internasional dan struktur kekuatan. Dalam menganalisis kepentingan Rusia dalam konflik Nagorno-karabakh, penulis menggunakan faktor internal dan eksternal sebagai faktor penentu. Faktor internal akan dititikberatkan pada kondisi ekonomi (termasuk pengembangan industri) dan militer sedangkan faktor internal akan difokuskan pada struktur kekuatan, opini publik dunia internasional dan reaksi negara lain.

Sebagai sebuah penentu, baik faktor internal maupun eksternal dianggap memiliki kontribusi signifikan terhadap keputusan suatu aktor terkait kebijakan luar negeri. Tak bisa dipungkiri keduanya memegang peranan mayor dalam kondisi suatu negara. Penelitian ini akan berfokus kepada faktor-faktor tersebut sebagai penentu dalam kebijakan luar negeri. Dengan menganalisa melalui pendekatan determinan ini dapat dipahami lebih mendalam tentang kepentingan yang hendak dicapai Rusia dalam konflik Nagorno-Karabakh.

2.2.3 Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional menjadi hal yang esensial bagi setiap usaha untuk menerangkan, menjelaskan, meramalkan atau membuat preskripsi mengenai perilaku internasional. Menurut Mohtar Mas'ood (1994, p.139) kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Negara menggunakan kepentingan nasional sebagai instrumen

pembenar terhadap aksinya di lingkungan internasional. Dalam pengertian sebagai instrumen pembenar tersebut, kepentingan nasional bisa muncul dalam berbagai bentuk dan aspek. Menurut Donald Nuechterlein dalam tulisannya *National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making* setidaknya terdapat 4 kepentingan nasional yang sifatnya mendasar yaitu: pertahanan, ekonomi, tatanan dunia dan ideologi (Nuechterlein, 1976; p. 248).

Dalam kasus keterlibatan Rusia sebagai mediator konflik Nagorno-Karabakh yang menjadi pusat penelitian tulisan ini, Rusia telah menegaskan bahwa terdapat kepentingan yang bisa memberi keuntungan (baik itu nasional maupun internasional akan dibahas lebih lanjut pada bab-bab berikutnya) bagi Rusia sehingga tindakan yang akan diambil merupakan tindakan yang akan memenuhi kepentingan tersebut. Hal ini kemudian memunculkan sebuah alur berpikir yang mana mampu memberikan anggapan bahwa upaya penetapan wilayah Nagorno-Karabakh merupakan tindakan politis yang akan diteliti lebih mendalam melalui faktor-faktor penentu kebijakan Rusia sebagai mediator konflik. Penelitian terhadap faktor-faktor penentu ini akan memberikan gambaran mengenai kepentingan Rusia dalam konflik Nagorno-Karabakh yang tak kunjung usai ini.

3. METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai dalam tulisan ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif yang mengarah pada bentuk pemaparan dan pendeskripsian hasil analisis data terhadap

rumusan masalah yang diajukan. Unit analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah negara-bangsa. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini penulis berupaya untuk mendeskripsikan upaya Rusia dalam menerapkan suatu kebijakan terhadap situasi tertentu, yang dalam hal ini nantinya akan dikhususkan pada faktor penentu kebijakan tersebut diambil terkait posisi Rusia sebagai mediator dalam konflik Nagorno-Karabakh.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan tentang faktor apa saja yang menjadi penentu kebijakan luar negeri Rusia sebagai mediator dalam konflik Nagorno-Karabakh. Bagian ini akan dijelaskan dengan menggunakan konsep determinan kebijakan luar negeri.

4. 1 Faktor Internal

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian kerangka konsep, maka faktor internal yang menjadi determinan Rusia sebagai mediator dalam konflik Nagorno-Karabakh adalah situasi ekonomi (termasuk pengembangan industri) serta kapabilitas militernya. Determinan ini sekaligus menunjukkan kepentingan Rusia yang ingin dicapai dalam konflik ini. Kepentingan ekonomi Rusia terlihat dari proses perdagangan senjata yang dilakukan pada kedua negara yang berkonflik. Kepentingan ini termasuk juga bagaimana industri militer Rusia berkontribusi pada perekonomiannya. Selain itu terdapat pula kepentingan dalam hal perlindungan jaringan pipa minyak Rusia. Dalam hal kapabilitas militer, hal yang menjadi fokus utama penulis adalah tentang

masalah penempatan pasukan peacekeeping di wilayah konflik.

4.1.1 Situasi Ekonomi dan Perkembangan Industri

Konflik Nagorno-Karabakh pada medio 2012 -2016 berada pada situasi frozen dan ini akan sangat cocok bagi Rusia untuk mempertahankan kepentingannya sendiri. Salah satunya adalah mengenai penjualan senjata. Dalam kasus penjualan senjata, tidak bisa dipungkiri Rusia mendapatkan keuntungan yang besar. Data dari Richard Connolly dan Cecilie Senstad dalam penelitian mereka di tahun 2017 menempatkan Rusia sebagai negara pengeskspor senjata terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat (Connolly and Senstad, 2017, p. 5). Pada tahun 2016 Rusia menikmati 21 % dari penjualan senjatanya secara global hanya dari kegiatan skala ekspor materialnya. Berdasarkan data dari SIPRI dalam Connolly dan Senstad (2017), bahwa angka penjualan senjata Rusia cenderung stabil dan tidak mengalami penurunan berarti dari tahun ke tahun. Bahkan di tahun 2013 angka ekspor senjata Rusia melampaui angka penjualan senjata yang dicapai oleh Amerika Serikat.

Proses penjualan senjata Rusia tidak terikat dengan skema yang rumit. Artinya Rusia mengambil kesempatan dari Amerika Serikat yang menerapkan ketentuan-ketentuan tertentu dalam membatasi negara tujuan penjualan dalam melakukan hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan senjata. Sebagai contoh dalam artikel yang ditulis Anna Borshchevskaya dan dimuat di situs *Jamestown Foundation: Global*

Research and Analysis dijelaskan bahwa Rusia, tidak seperti Amerika Serikat, tidak melarang tindakan senjata hasil ekspornya untuk dijual lagi oleh negara pembeli. Hal ini terjadi di Mesir yang artinya senjata hasil transaksi dari Rusia bisa dijual lagi oleh Mesir ke negara lain sedangkan kalau transaksi ini dilakukan dengan Amerika Serikat maka senjata-senjata itu harus tetap berada di Mesir (Borshchevskaya, 2017). Selain itu, bila dilihat dari segi kualitas maka kualitas senjata yang diperjualbelikan oleh Rusia tidak kalah dan bahkan jauh lebih baik dibandingkan dengan senjata Amerika Serikat ataupun negara Eropa lainnya. Dengan dasar pemikiran kompetisi dengan Amerika Serikat inilah penulis kemudian berpendapat bahwa sudah menjadi keharusan bagi Rusia untuk tetap menjaga “pelanggan-pelanggan”nya agar tidak berpindah ke penjual yang lain.

Di samping itu, penjualan senjata juga sangat menguntungkan dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian Rusia. Hal ini bisa dilihat dari dua hal. Pertama, dari segi lapangan kerja. Connolly dan Senstad menjelaskan bahwa industri manufaktur militer dan pertahanan memberikan dampak yang signifikan terutama dalam hal penyediaan lapangan kerja. Kontribusi yang dapat diberikan oleh industri ini mencapai angka 2,5 juta pekerja di Rusia (Connolly and Senstad, 2017, p.3). Hal ini setara dengan 3 % total jumlah pekerjaan dan sekitar sepertiga dari pekerjaan di bidang manufaktur. Dengan jumlah populasi penduduk Rusia sampai tahun 2017 yang mencapai 144 juta orang (World bank, 2018), maka industri ini tergolong mampu menyerap pekerja dengan baik. Data ini semakin meyakinkan penulis

bahwa kebijakan mengurangi atau bahkan menghentikan ekspor senjata terhadap negara tertentu akan memberikan dampak ekonomi yang laur biasa besar terhadap Rusia sehingga opsi ini bukanlah pilihan terbaik bagi Rusia. Secara tidak langsung, bila konflik terus berjalan dan bereskalasi maka pasokan persenjataan akan terus dibutuhkan sebagai persiapan dan bentuk kewaspadaan antar dua negara yang berkonflik. Inilah yang kemudian menurut penulis coba dieksploitasi oleh Rusia dengan melakukan perdagangan senjata kepada kedua negara disamping tugasnya sebagai seorang mediator seperti yang dikatakan oleh Larsen sebagai *playing both sides* (Larsen, 2016).

Upaya penjualan senjata Rusia juga memberikan keuntungan dalam hal *deterrent*. Sebagaimana dikatakan oleh Deputy Perdana Menteri Rusia, Dimitri Rogozin dalam wawancaranya dengan *Ekho Moskvyy radio*, pasca peristiwa four day war. Ia menjelaskan bahwa kebijakan penjualan senjata kepada kedua negara sekaligus menjadi fungsi *deterrent* bagi negara lain. Bila Rusia menghentikan hal tersebut, maka negara lain akan masuk ke wilayah tersebut dan menjual berbagai senjata termasuk berbagai tipe senjata yang sifatnya offensif (The Moscow times, 2016).

Hal lain yang juga berkaitan dengan situasi ekonomi Rusia adalah terkait jalur minyak Rusia. Jaringan pipa minyak dan gas yang ada saat ini di wilayah Kaukasus Selatan praktis berada di bawah “kekuasaan” Rusia akibat perjanjian kerjasama minyaknya dengan Armenia dan Azerbaijan. Rusia telah mempertahankan posisinya yang dominan di

pasar Eropa dan kontrol atas sistem pipa yang membentang dari Eropa pasca-Soviet ke Eropa Barat (Ramos, 2017, p.3). Data dari situs sebuah perusahaan minyak milik Azerbaijan SOCAR, www.socar.az dan mengatakan bahwa terdapat paling tidak 4 jaringan pipa minyak dan gas yang tersebar di wilayah Kaukasus Selatan. Dari ke-empat jaringan pipa ini, 3 diantaranya berdekatan dengan zona konflik Nagorno-Karabakh. Jaringan-jaringan pipa ini mampu mengangkut hampir 2 juta barrel/harinya (Socar, 2018).

Rusia perlu mengingatkan tentang hal ini untuk menjaga agar kondisi jaringan pipa tersebut tetap aman dan tidak menjadi sasaran acak pada eskalasi konflik Nagorno-Karabakh. Jaringan pipa ini adalah aset yang telah menjadikan Rusia sebagai pemasok minyak dan gas utama ke Eropa sebab banyak perusahaan minyaknya yang terlibat di sana. Kerusakan jaringan pipa akan membuat rencana pembangunan jaringan pipa lain semakin mengemuka dan hal tersebut merupakan impian Amerika Serikat dan negara Eropa lainnya. Pembangunan pipa baru akan mengambil rute baru yang tentu saja tidak akan melewati Rusia. Inilah yang ditentang oleh Rusia sebab saat ini semua jaringan pipa di Kaukasus Selatan, termasuk yang dekat dengan Nagorno-Karabakh berada di bawah kekuasaan Rusia. Jaringan pipa yang baru akan menjadi pintu masuk bagi negara barat untuk ikut mengeruk minyak dan gas. Pada tahap selanjutnya negara-negara barat ini tidak hanya saja mengeruk minyak tapi juga akan memperluas pengaruhnya di kawasan tersebut. Hal ini juga akan menjadi tantangan serius terhadap

upaya Rusia menghalau pengaruh barat di Kaukasus Selatan. Karena itu, upaya pembangunan pipa baru transkaspia ditolak oleh Rusia (Israfilbayova, 2017; Kramer, 2018).

4.1.2 Kapabilitas Militer

Kepentingan lain yang juga tidak kalah penting yang dimiliki Rusia dari konflik Nagorno-Karabakh ini adalah tentang penempatan pasukan *peacekeeping*. Sebagai langkah untuk meningkatkan pengaruh politik, maka diperlukan sebuah “rantai” sebagai alat kontrol langsung terhadap sebuah wilayah. Hal ini pula yang ingin dilakukan Rusia di wilayah Kaukasus Selatan. Seperti yang telah diketahui, negara lain di Kaukasus Selatan juga memiliki ikatan konflik dengan Rusia yaitu Georgia. Bila dilihat secara geografis, Rusia berbatasan langsung dengan Georgia tetapi tidak dengan wilayah Nagorno-Karabakh.

Melalui penempatan pasukan *peacekeeping*, Rusia akan memiliki kontrol langsung dengan wilayah Nagorno-Karabakh tanpa perlu khawatir batasan geografis. Menurut Gorecki, usulan penempatan pasukan *peacekeeping* telah disuarakan oleh Rusia sejak tahun 1990-an (Gorecki, 2016, p.5). Skema penempatan pasukan *peacekeeping* tersebut akan dijalankan melalui koordinasi dengan CIS (organisasi regional beranggotakan negara-negara eks Uni Soviet), sehingga walaupun berlabel pasukan *peacekeeping* tetapi yang akan ditempatkan adalah pasukan Rusia. Dengan demikian, Rusia akan berhubungan langsung dengan zona konflik serta dengan mudah akan

memberikan tekanan pada kedua negara yang berkonflik tersebut.

4.2 FAKTOR EKSTERNAL

Faktor eksternal yang menjadi fokus penulis adalah tentang struktur kekuatan, reaksi negara lain dan opini publik internasional. Struktur kekuatan akan berkaitan dengan dampak konflik Nagorno-karabakh terhadap situasi geopolitik di kawasan serta relasi ketiga negara yang terlibat yakni Rusia, Armenia dan Azerbaijan. Mengenai reaksi negara lain penulis akan mengkhususkan pada reaksi negara-negara barat yang tergabung dalam pakta pertahanan NATO. Sedangkan pada bagian opini publik internasional penulis akan melihat bagaimana konflik Nagorno Karabakh menjadi alat untuk membangun imej Rusia di dunia internasional.

4.2.1 Struktur Kekuatan dan Reaksi Negara Lain

Dengan menjadikan mediator sebagai kebijakan luar negeri dalam keterlibatannya di konflik Nagorno-karabakh, maka dapat dilihat determinan yang muncul dari tindakan tersebut khususnya dalam hal struktur kekuatan dan reaksi yang muncul dari negara lain. Pernyataan Presiden Putin dan Deputi Rogozin sebelumnya yang akan terus menjual senjata ke kedua pihak yang berkonflik kemudian memunculkan implikasi lainnya terutama dalam hal geopolitik Rusia. Pernyataan ini selain sebagai bentuk sikap Rusia di satu sisi juga memicu perhatian dan reaksi dari negara lain. Salah satunya adalah negara-negara yang tergabung dalam NATO.

Sebagaimana dikatakan oleh Hedenskog dan Korkmaz (2016), NATO memang tertarik untuk terlibat di kawasan Kaukasus Selatan melalui konflik Nagorno-Karabakh. Caranya adalah dengan membujuk Azerbaijan masuk sebagai salah satu anggotanya. Azerbaijan memang pilihan yang tepat bagi NATO karena statusnya yang bukan merupakan aliansi Rusia seperti Armenia tapi memiliki dampak terhadap Rusia sebagai kekuatan regional di kawasan Kaukasus Selatan. Azerbaijan dalam beberapa tahun terakhir tumbuh menjadi suatu negara dengan kekuatan ekonomi yang cukup mapan berkat minyaknya dan ini menjadi perhatian serius bagi Rusia (Jarosiewicz and Strachota, 2011, p.). Di tambah lagi apa yang diinginkan Rusia agar terjadi di Azerbaijan ternyata tidak terjadi. Menurut Leckie, tujuan strategis Rusia di Kaukasus Selatan terwujud dalam 3 prinsip. Pertama, negara-negara kaukasian harus menjadi anggota dari CIS ; kedua, batas-batas terluar negara kaukasian ini yang berbatsan dengan Iran dan Turki harus dijaga oleh pasukan perbatasan Rusia; ketiga, markas militer Rusia harus ada di negara-negara ini (Leckie, 2005, p.7). Rusia sudah berhasil menjalankan ketiga prinsip ini di Armenia tetapi tidak di Azerbaijan.

Selain itu, Rusia adalah pihak yang tidak ingin posisi status quo di kawasan mengalami perubahan apalagi sampai bergeser kekuatan politisnya sebagai *regional power*. Apabila pada akhirnya Azerbaijan bergabung dengan NATO, maka NATO akan bebas dan leluasa untuk masuk di wilayah tersebut melalui prinsip kesetiakawanannya yang mana bila satu anggota diserang maka

NATO akan campur tangan juga. Bila hal ini terjadi maka yang akan sangat dirugikan adalah Rusia sebab akan ada dua kekuatan besar di kawasan tersebut. Kehadiran NATO akan memberikan konfrontasi langsung terhadap Rusia yang juga telah membentuk suatu badan militer yang serupa dengan NATO bernama CSTO. Badan ini ditujukan untuk “menghimpun” negara-negara bekas Uni Soviet. Dengan bergabungnya, Azerbaijan ke dalam CSTO ini bisa dipastikan bahwa pengaruh barat khususnya NATO akan semakin mudah untuk ditekan bahkan dihilangkan dari kawasan Kaukasus Selatan. Contohnya adalah seperti yang dilakukan oleh Rusia terhadap Armenia. Rusia berhasil memaksa Armenia untuk membatalkan Association Agreement dengan European Union (EU) di tahun 2013 akibat komitmennya dalam CSTO (Hedenskog dan Korkmaz, 2016).

Masih dalam kaitannya dengan struktur kekuatan, hal yang perlu dilihat pula adalah hubungan antara ketiga negara yakni Rusia, Armenia dan Azerbaijan. Rusia datang ke meja perundingan dengan posisinya sebagai negara mapan di kawasan. Khadiagala dalam bagian kerangka konsep telah mengatakan bahwa negara mapan dengan intensinya sendiri dan bertindak sebagai mediator maka akan dengan mudah menguasai proses mediasi. Penulis memiliki argumen bahwa kehadiran Rusia dalam proses mediasi adalah untuk mengingatkan kedua negara agar saling menghormati setiap komitmen yang telah disetujui terutama dengan Rusia. Dengan kapabilitas militernya yang kuat penulis meyakini bahwa ini hal tersebut bisa cukup memaksa kedua negara

untuk mempertimbangkan atau bahkan menuruti keinginan Rusia.

Komitmen-komitmen antara ketiga negara tersebut terwujud dalam hubungan yang tergolong unik dalam konflik Nagorno-Karabakh. Armenia adalah aliansi lama Rusia dan Azerbaijan adalah pelanggan Rusia dalam penjualan senjata. Posisi Armenia sebagai aliansi Rusia menjadikannya sangat bergantung pada Rusia termasuk dalam hal persenjataan. Menurut data dari SIPRI sepanjang tahun 2012 - 2017 Armenia hanya membelanjakan budget militernya pada Rusia (SIPRI, 2018). Sebaliknya, Rusia telah melakukan kerjasama militer dengan Armenia yang membuat pengaruhnya di Armenia menjadi sangat besar termasuk kerjasama tentang pembangunan pangkalan militer yang terus diperpanjang sampai 2044 (Jarosiewicz and Strachota, 2011, p. 2). Selain itu, menurut The Moscow Times pada tahun 2016 dalam perjanjian terbaru antara Rusia dengan Armenia, disebutkan bahwa Rusia akan memberikan kredit dana senilai 200 miliar US\$ kepada Armenia untuk kebutuhan belanja militer seperti tank anti misil, sistem roket launch dan peralatan militer lain (The Moscow Times, 2016). Sedangkan Azerbaijan telah menjadi pelanggan senjata Rusia sejak tahun 2007 (Daskalova, 2015). Perkembangan transaksi kedua negara berada di tahap yang positif karena mengalami peningkatan dalam dua periode waktu. Periode pertama dari tahun 2007 - 2011 transaksi yang terjadi menghabiskan 55% budget Azerbaijan dan di periode berikutnya 2013 - 2017 angka ini meningkat menjadi 65% (Daskalova, 2015; Aliyev, 2018). Terlihat jelas bahwa dengan situasi

konflik Nagorno-Karabakh yang bersifat frozen, tanpa kejelasan dan eskalasi yang bisa terjadi kapan saja, Rusia memposisikan dirinya dengan sangat baik dalam memaksimalkan kesempatan serta mengambil keuntungan dari kedua negara. Apalagi tidak terdapat keharusan bagi Rusia terkait posisinya sebagai mediator untuk menemukan resolusi konflik sebab tugas fasilitasi telah Rusia jalankan dengan aktif seperti yang disampaikan oleh Adistia. Rusia hadir di meja perundingan untuk mengingatkan kembali agar sampai perjanjian-perjanjian ini tidak dilanggar dan berada di koridor yang aman.

4.2.2 Opini Publik Internasional

Hal lain yang juga bisa menguntungkan Rusia dalam perannya sebagai mediator adalah mengenai peran sebagai scapegoat. Menurut Fuller sebagaimana dikutip oleh Rahmadi dan juga oleh Prasada Arnaya dalam skripsinya *Peran Dari OSCE Minsk Group Dalam Mediasi Konflik Di Wilayah Nagorno-Karabakh*, peran *Scapegoat* adalah peran sebagai “kambing hitam” yang mana seorang mediator akan memainkan peran sebagai pihak yang bersalah jika proses mediasi tidak sesuai dengan keinginan pihak-pihak yang berkonflik (Arnaya, 2015). Mediator akan menerima berbagai kritikan (termasuk dari dunia internasional) dan akan menjadi sumber kesalahan bila proses mediasi mandek dan terhambat. Peran *scapegoat* ini, di satu sisi, bisa memberi dampak positif karena akan menghindarkan pihak-pihak yang berkonflik dari tindakan saling menyalahkan satu sama lain. Relevansinya dalam konflik Nagorno-

Karabakh adalah Rusia telah menjalankan perannya sebagai *scapegoat* dengan baik karena telah membentuk opini publik internasional tersendiri dengan menjadi sasaran kritik akibat dari proses mediasi konflik yang berjalan sangat lama. Rusia dituduh dan dikecam akibat tidak memiliki tekad untuk menyelesaikan konflik ini dan juga lebih pro Armenia (Arnaya, 2015).

Bagi penulis peran *scapegoat* adalah jalur alternatif sempurna bagi Rusia untuk menutupi aksi *double dealing*-nya dengan Armenia dan Azerbaijan. Skenario yang dimainkan Rusia adalah dengan melakukan suplai senjata ke kedua negara yang tentunya memberikan keuntungan finansial seperti yang dijelaskan sebelumnya. Persaingan senjata kedua negara memungkinkan kontak senjata untuk bisa terjadi kapan saja. Di saat eskalasi terjadi, maka fokus perhatian akan ditujukan pada mediator yang tidak mampu meredam eskalasi. Dengan berperan sebagai *scapegoat*, maka pada titik itu terdapat semacam permakluman terhadap tindakan mediator yang lalai dalam upaya mediasi. Kritikan yang ditujukan pada Rusia bukan apa-apa bila dibandingkan dengan keuntungan yang bisa didapatkan dari upaya penyuplaian senjata. Dengan skenario seperti ini maka proses mediasi akan berjalan kembali ke titik awal dan Rusia akan mencoba kembali membuka ruang fasilitasi yang baru lagi bagi kedua negara. Proses mediasi tetap berjalan, Rusia mendapat kecaman sekaligus keuntungan dari aksi *double dealing*-nya. Atas dasar pertimbangan inilah maka penulis menyebutkan peran *scapegoat* adalah jalan alternatif terbaik bagi Rusia menutupi

kendalinya terhadap konflik Nagorno-Karabakh ini.

Di samping itu, peran sebagai mediator juga dibutuhkan Rusia demi menjaga imejnya di mata internasional pasca kejadian pencaplokan wilayah di Crimea. Tahun 2014 Rusia menganeksasi Crimea dan menyebabkan konflik yang menewaskan 10.000 orang baik masyarakat sipil dan kombatan serta melukai 25.000 orang (Smith, 2019, p.9)). Situasi yang terjadi di Crimea mirip dengan yang terjadi di Nagorno-Karabakh yang mana terdapat juga penduduk Rusia di Nagorno-karabakh. Dengan kesamaan ini Rusia bisa membuktikan bahwa keberadaan warga Rusia di suatu wilayah konflik tidak selamanya menuntut upaya pencaplokan. Walaupun, menurut penulis sendiri tindakan Rusia ke depannya belum bisa diprediksi dan ditambah lagi dibawah kendali Presiden Putin bukan tidak mungkin akan muncul kebijakan-kebijakan yang sama seperti yang terjadi di Crimea.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memperoleh bukti terkait faktor-faktor penentu kebijakan luar negeri Rusia sebagai mediator dalam konflik Nagorno-Karabakh tahun 2012 – 2016. Dengan menggunakan konsep mediator, determinan kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional sebagai pisau analisis maka penulis menyimpulkan bahwa konflik Nagorno-Karabakh banyak menimbulkan implikasi terhadap kepentingan Rusia sehingga menjadikan mediator sebagai kebijakan luar negerinya. Kepentingan-kepentingan ini dapat dilihat dari dua faktor

yakni internal (dalam hal ini penulis fokuskan pada bidang ekonomi dan militer Rusia) dan faktor eksternal. Faktor ekonomi dan militer memainkan peran dalam kepentingan jual beli senjata Rusia dengan Azerbaijan dan Armenia, dua negara yang terlibat konflik Nagorno-Karabakh. Rusia tergolong penjual senjata terbesar kepada Armenia dan juga Azerbaijan. Kegiatan transaksi ini telah ikut mendorong berkembangnya manufaktur senjata yang berdampak pada penyediaan lapangan kerja di Rusia. Selain itu, penempatan pasukan *peacekeeping* di wilayah konflik juga menjadi perhatian penulis yang erat pula kaitannya dengan kapabilitas militer Rusia sebagai negara *regional power*. Faktor ekonomi dan militer ini secara langsung melayani kepentingan nasional Rusia seperti yang diungkapkan oleh Nuechterlein tentang 4 kepentingan nasional mendasar yang diperjuangkan negara.

Di sisi lain faktor eksternal dapat dilihat dari struktur kekuatan, reaksi negara lain dan opini publik internasional. Situasi *status quo* pada konflik Nagorno-Karabakh menjadi hal yang diinginkan Rusia karena transaksi penjualan senjatanya. Hal yang sama juga menjadi bagian dari kepentingan nasional Rusia seperti yang diungkapkan Nuechterlein tentang *world order interest*. Selain itu, pergerakan konflik yang melebar akan mengancam kepentingan energi Rusia dalam hal ini jaringan pipanya yang merupakan supplier utama minyak dan gas ke Eropa. Bila sampai hal itu terjadi maka negara-negara barat akan turut campur untuk membangun jalur pipa baru yang akan mengisolasi Rusia. Keterlibatan negara-negara barat adalah hal yang tidak diinginkan Rusia. Dengan upaya

mediasi trilateral yang digagas Rusia, kepentingan ini akan terus diingatkan Rusia di meja perundingan. Rangkaian tindakan ini akan ditutup dengan peran *scapegoat* atau sebagai pihak yang dipersalahkan dalam upaya mediasi. Berperan sebagai “kambing hitam” dengan terus mengupayakan resolusi di berbagai kesempatan selanjutnya adalah pilihan yang akan diambil Rusia ketimbang kehilangan kepentingan-kepentingan yang juga akan berdampak pada posisinya di kawasan. Selain itu, peran sebagai mediator juga dibutuhkan Rusia demi menjaga imej nya di mata internasional pasca kejadian aneksasi wilayah di Crimea tahun 2014. Rusia bisa membuktikan bahwa melalui konflik Nagorno-Karabakh ini, keberadaan warga Rusia di suatu wilayah konflik tidak selamanya menuntut upaya aneksasi.

6. DAFTAR PUSTAKA

Artikel Koran Online

Israfilbayova, Sara. (2017). Expert: Europe Still Interested in the Trans-Caspian Gas Pipeline. Azernews. Retrieved from: https://www.azernews.az/oil_and_gas/113422.html [18 January 2019].

Kramer, Andrew E. (2018). Russia and Four Other Nations Settle Decades-Long Dispute over Caspian Sea. The New York Times. Retrieved from: <https://www.nytimes.com/2018/08/12/world/europe/caspian-sea-russia-iran.html> [18 January 2019].

RFERL. (2014a). Putin to Host Armenian, Azerbaijani Presidents in Sochi. Retrieved from: <https://www.rferl.org/a/karabakh-russia-armenia-azerbaijan-presidents->

[meeting-sochi/26522257.html](https://www.themoscowtimes.com/articles/russia-will-continue-selling-weapons-to-azerbaijan-and-armenia-rogozin-52489) [10 November 2018].

The Moscow Times. (2016). Russia Will Continue Selling Weapons to Azerbaijan and Armenia – Rogozin. Retrieved from: <https://themoscowtimes.com/articles/russia-will-continue-selling-weapons-to-azerbaijan-and-armenia-rogozin-52489> [14 January 2019].

Buku

Mas'oeed, Mohtar. (1994). Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.

Buku Online

Khadiagala, Gilbert M. (2007). Meddlers or Mediators? African Interveners in Civil Conflicts in Eastern Africa, USA: Martinus Nijhoff Publishers.

Dokumen Organisasi atau Lembaga Pemerintah

International Crisis Group. (2016). Nagorno-Karabakh: New Opening or More Peril?. Europe Report. 239. pp 1-25. Retrieved from: <https://www.refworld.org/pdfid/577b5dd74.pdf> [14 January 2019].

SIPRI. (2018). Military expenditure by country, in constant (2016) US\$ m., 1988-1997. Retrieved from: https://www.sipri.org/sites/default/files/1_Data%20for%20all%20countries%20from%201988%E2%80%932017%20in%20constant%20%282016%29%20USD.pdf [3 January 2019].

SIPRI. (2018). Transfers of major weapons: Deals with deliveries or orders made for 2012 to 2017. Retrieved from:

http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php [5 Juni 2018].

SOCAR. (2018). About SOCAR. Retrieved from:
<http://www.socar.az/socar/en/company/about-socar/discover-socar> [7 January 2019].

Jurnal Online

Adistia, Enzy. (n.d.). Keterlibatan Rusia dalam Upaya Resolusi Konflik Nagorno-Karabakh antara Armenia dan Azerbaijan 2008-2012. Jurnal Skripsi Universitas Airlangga. Retrieved from:
<http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Jurnal%20Skripsi%20Ensi%20Adisty%20K%20070912016.pdf> [10 November 2018].

Akpinar, Pinar. (2015). Mediator as a Foreign Policy Tool in the Arab Spring: Turkey, Qatar and Iran. *Journal of Balkan and Near Eastern Studies*, 2015. pp 1-17. Retrieved from:
<http://dabamirror.scihub.tw/4345/458642a565e6632cd4965a4039bee3b2/10.1080@19448953.2015.1063270.pdf> [6 February 2019].

Aliyev, Nurlan. (2018). Russia's Arms Sales: A Foreign Policy Tool in Relations With Azerbaijan and Armenia. The Jamestown Foundation: Global Research and Analysis. *Publication in Eurasia Daily Monitor* Volume 15, Issue 47. Retrieved from:
<https://jamestown.org/program/russias-arms-sales-foreign-policy-tool-relations-azerbaijan-armenia/> [14 January 2019].

Arnaya, I Putu Angga Prasada. (2015). Peran dari OSCE Minsk Group dalam Mediasi Konflik di Wilayah Nagorno-Karabakh. *Jurnal Hubungan internasional Universitas Udayana*. Vol 1. No. 03. Retrieved from:

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/14415/9903> [14 January 2019].

Jain, Reetesh. (2018). Significance and Determinants of Foreign Policy. *International Journal of Advanced Research and Development*. Vol 3. Issue 1. pp 164 – 166. Retrieved from:
<http://www.advancedjournal.com/download/940/3-1-63-371.pdf> [28 December 2018].

Nuechterlein, Donald E. (1976). National Interest and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making. *British Journal of International Studies*. Vol 2. No. 3. pp 246 – 266. Retrieved from:
<http://moscow.scihub.tw/2158/c386eafb7f2570d1b68e50af32149bf9/10.2307@20096778.pdf> [22 March 2019].

Ramos, Jose A. Pena. (2017). The Impact of Russian Intervention in Post-Soviet Secessionist Conflict in the South Caucasus on Russian Geo-energy Interests. *International Journal of Conflict and Violence*. Vol 11. No. 03. pp 1-13. Retrieved from:
<http://www.ijcv.org/index.php/ijcv/article/download/464/pdf> [18 December 2018].

Research Paper Online

Connolly, Richard and Senstad, Cecilie. (2017). Research Paper. Russian and Eurasia Programme. Chatham House: The Royal Institute of International Affairs. pp 1-30. Retrieved from:
<https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2017-03-20-russia-arms-exporter-connolly-sendstad.pdf> [9 January 2019].

Smith, Ben. (2019). Cool Conflicts in Russia's Near Neighbourhood. Briefing Paper:

House of Commons Library. No. 8477. pp 1-32. Retrieved from: <http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-8477/CBP-8477.pdf> [9 February 2019].

Sprague, Andrew. (2015). Russian Meddling in its Near Abroad. The Use of Frozen Conflicts as a Foreign Policy Tool. Student Paper series 28. pp 1-24. Retrieved from: http://www.ibei.org/ibei_studentpaper28_7_1440.pdf [21 May 2018].

Thesis Online

Leckie, Chanda Allana. (2005). The Nagorno-Karabakh Conflict: Obstacles and Opportunities for a Settlement. Thesis in Political Science. Virginia Polytechnic Institute and State University. pp 1-68. Retrieved from: <https://vtechworks.lib.vt.edu/bitstream/handle/10919/32800/ChandaFinal.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [16 December 2018].

Sumber Lainnya

Borshchevskaya, Anna. (2017). The Tactical Side of Russia's Arms Sales to the Middle East. The Jamestown Foundation: Global Research and Analysis. Retrieved from: <https://jamestown.org/program/tactical-side-russias-arms-sales-middle-east/> [9 January 2019].

Daskalova, Anna. (2015). Problem or Solution? Russia's Role in the Nagorno-Karabakh Conflict. Retrieved from: <https://www.e-ir.info/2015/10/19/problem-or-solution-russias-role-in-the-nagorno-karabakh-conflict/> [4 August 2018].

Gorecki, Wojciech. (2016). Nagorno – Karabakh: What is Russia up to?. Retrieved from: <https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2016-04-13/nagorno-karabakh-what-russia-to> [04 August 2018].

Hedenskog, Jakob and Korkmaz, Kaan. (2016). The Interests of Russia and Turkey in the Nagorno-Karabakh Conflict. RUFBS Briefing no. 35. Retrieved From: <https://foi.se/download/18.2bc30cfb157f5e989c31827/1477482864006/RUFBS+Briefing+No.+35+.pdf> [21 May 2018].

Jarosiewicz, Aleksandra and Strachota, Krysztof. (2011). Nagorno-Karabakh: Conflict Unfreezing, OSW Center for Eastern Studies Issue 65. pp 1-8. Retrieved from: https://www.files.ethz.ch/isn/134013/commentary_65.pdf [12 June 2018].

Larsen, Joseph. (2016). Russia's Double Dealing in Armenia and Azerbaijan. International Policy Digest. Retrieved from: <https://intpolicydigest.org/2016/12/07/russia-s-double-dealing-armenia-azerbaijan/> [16 Dcember 2018].

Mediamax. (2012). Presidents of Armenia, Azerbaijan and Russia to Meet in Sochi Today. Retrieved from: <https://mediamax.am/en/news/politics/3678/> [19 November 2018].

Sargasyan, Anna. (2013). Nagorno-Karabakh: Obstacles to a Negotiated Settlement. CSS Analysis in Security Policy, 131. pp 1-4. Retrieved from: <http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/pecial-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/CSS-Analysis-131-EN.pdf> [24 October 2018].